

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Aksi perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia berawal dari maraknya kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan pencemaran limbah terhadap wilayah perairannya. Hal tersebut memicu protes para nelayan dan warga negara pesisir pantai Somalia untuk mengambil tindakan dengan menangkap kapal-kapal asing yang mengeksploitasi wilayah perairannya. Namun tindakan para nelayan Somalia tersebut berkembang menjadi sebuah bisnis kejahatan internasional dengan jumlah yang cukup masif dan meluas hingga ke wilayah lepas pantai Somalia yang mencakup wilayah Teluk Aden, Samudera Hindia dan Laut Arab.

Peran ICPO-INTERPOL untuk menangani perompakan di lepas pantai Somalia dilakukan dengan cara mengumpulkan *Evidence Collection*, melakukan pertukaran informasi dan membangun kapabilitas investigasi penegak hukum di Tanduk Afrika. *Global Maritime Piracy Database* yang dibuat oleh ICPO-INTERPOL sebagai wadah untuk mengumpulkan informasi dan bukti (*Evidence Collection*) mengenai perompakan berhasil membantu Belgia mengesktradisi dan menegakan hukum tersangka perompak yang berhasil menyerang kapal Belgia. Dalam melakukan pertukaran informasi, ICPO-INTERPOL memfasilitasi sistem komunikasi I-24/7. Melalui sistem I-24/7 ICPO-INTERPOL telah mendapatkan banyak informasi dan data terkait perompakan yang diberikan oleh negara anggotanya sehingga ICPO-INTERPOL dapat melengkapi *Global Maritime Piracy Database*. Sedangkan dalam upayanya meningkatkan kapabilitas investigasi kawasan Tanduk Afrika untuk menegakan hukum terhadap aksi perompakan di lepas pantai Somalia dilakukan dengan dua cara, yang pertama menerapkan Proyek EVEXI bagi lembaga penegak hukum Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Oman, Seychelles, Somalia dan Tanzania. Proyek EVEXI ini berhasil diterapkan oleh hampir seluruh negara-negara tersebut kecuali Somalia. Jumlah penangkapan perompak dalam tahanan di negara Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Oman, Seychelles, dan Tanzania menunjukkan

bahwa mereka berhasil melakukan penegakan hukum terhadap para tersangka perompakan. Yang kedua, ICPO-INTERPOL memberikan dukungan pelatihan terhadap negara Kenya, Tanzania, Somalia, Yemen, Djibouti, Mauritius dan Seychelles. Dukungan pelatihan mencakup *Crime scene investigation training* dan *Crime scene investigation equipment*. Kegiatan *Crime scene investigation training* telah berhasil diadakan sebanyak tiga kali sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan materi pelatihan yang berbeda-beda pada setiap pertemuannya. Sedangkan *Crime scene investigation equipment* hanya diberikan terhadap Seychelles, dengan memberikan perlengkapan sistem identifikasi sidik jari otomatis atau *automatic fingerprint identification system* (AFIS) untuk mendukung melakukan investigasi terhadap pelaku perompakan di lepas pantai Somalia.

Dapat disimpulkan bahwa setiap peran yang dilakukan oleh ICPO-INTERPOL saling mempengaruhi satu sama lain. ICPO-INTERPOL juga mampu membantu beberapa negara anggotanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap para tersangka perompakan di lepas pantai Somalia melalui Proyek EVEXI, pertukaran informasi dan pengumpulan barang bukti. Namun dalam memberikan dukungan pelatihan yang dilakukan ICPO-INTERPOL masih terlihat belum maksimal, dimana kegiatan *Needs Assesment* hanya terealisasi bagi Seychelles dan Kenya diantara negara-negara Afrika Timur lainnya yang seharusnya juga diterapkan. Hal tersebut berdampak terhadap kurangnya dukungan *Crime scene investigation equipment* yang diberikan ICPO-INTERPOL terhadap negara-negara Afrika Timur lainnya. Sehingga hanya Seychelles yang dapat merasakan dukungan dari *Crime scene investigation equipment tersebut*, bahkan Kenya yang telah melalui tahap *Needs Assesment* tidak mendapatkan dukungan *Crime scene investigation equipment*.

IV. 2 Saran

ICPO-INTERPOL diharapkan dapat memberikan dukungan pelatihan atau membantu dengan bentuk dukungan lainnya secara maksimal dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum khususnya kepolisian negara Somalia. Karena Somalia memiliki kapasitas lembaga penegak hukum yang kurang efektif akibat dari krisis di negaranya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya

perompak yang berkeliaran di lepas pantai Somalia, peningkatan kapabilitas kepolisian Somalia sangat dibutuhkan guna mengatasi dan menegakan hukum bagi perompak yang berkembang di negaranya.

